

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Maryono¹⁾, Achmad Badjuri²⁾, Jaeni³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Email: maryono@edu.unisbank.ac.id

Abstrak : *Otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 hingga barjalan sekitar sepuluh tahun masih menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah dan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat masih tinggi termasuk daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Sebagai upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah telah diundangkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku mulai tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan pajak daerah, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan bagaimana kontribusi masing-masing jenes pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota sehingga berjumlah 35 daerah dengan tahun amatan selama tiga tahun dari tahun 2016 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 22,58 % dan tahun 2018 tumbuh 14,83%/ Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata tahun 2016 sebesar 27,05 %, tahun 2017 sebesar 25,84 % dan tahun 2018 sebesar 32,01 %. Kontribusi jenis pajak daerah yang baru tercantum dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 khususnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah cukup signifikan sehingga mampu meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 1. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup signifikan; 2. Kontribusi jenis pajak daerah yang baru berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.*

Kata kunci: *pajak daerah, pendapatan asli daerah.*

Abstract : *Regional autonomy which began in 2001 until about ten years still shows low regional fiscal independence and high dependence on central government transfer funds, including districts and cities in Central Java province. In an effort to encourage an increase in local revenue, Law number 28 of 2009 on regional taxes and levies has been enacted starting in 2010. This study aims to determine how local taxes grow, the contribution of local taxes to local revenue, and how they contribute. -Each type of local tax on local tax revenues in districts and cities in Central Java province. The population and sample in this study were districts and cities in the province of Central Java, which consisted of 29 districts and 6 cities,*

so that there were 35 regions with three years of observation from 2016 to 2018. The results showed that on average the regency and local taxes cities in Central Java province experienced an increase, from 2016 to 2017 of 22.58% and in 2018 it grew 14.83% / Contribution of local taxes to local revenue of districts and cities in Central Java province on average in 2016 was 27.05%, in 2017 amounted to 25.84% and in 2018 amounted to 32.01%. The contribution of the new types of local taxes listed in law number 28 of 2009, especially the tax on acquisition of land and building rights as well as land and building taxes to district and city tax revenues in Central Java province is quite significant so that it can increase the contribution of local taxes to income native to regencies and cities in the province of Central Java. The conclusions in this study are: 1. The contribution of local taxes to local revenue is quite significant; 2. The contribution of new types of local taxes has a significant contribution to local tax revenues.

Keywords: *local taxes, local revenue.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia yang sudah berlangsung sekitar dua puluh tahun belum menunjukkan hasil yang diharapkan khususnya dalam hal kemandirian fiskal daerah baik pada daerah kabupaten / Kota atau provinsi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat baik berupa dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah kabupaten dan kota di Indonesia secara rata-rata kurang dari 25 persen yang berarti sangat rendah sehingga secara rata-rata dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi yaitu lebih dari 75 persen dari total pendapatan daerah.

Upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan memberikan tambahan sumber pendapatan asli daerah telah dikeluarkan antara lain dengan diundangkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Khusus tentang pajak daerah yang diatur dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah kabupaten / kota diberikan tambahan jenis pajak daerah yang baru meliputi : pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet.

Beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini meliputi : 1. Bagaimana perkembangan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah; 2. Bagaimana kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah; 3 Bagaimana kontribusi pendapatan dari jenis pajak daerah yang baru terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Dengan rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di muka, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi diperolehnya informasi tentang : 1. Perkembangan pajak daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah; 2. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah; 3. Efektivitas undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini seluruh kabupaten dan kota yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 daerah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan tahun amatan 2016 hingga tahun 2018. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa laporan publikasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis diskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

Secara rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga 2018 berfluktuasi dimana tahun 2017 mengalami peningkatan dan tahun 2018 mengalami penurunan. Adanya penurunan pendapatan asli daerah tentu memberikan sinyal yang kurang baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan secara umum kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat tetapi sumber dana yang berasal dari daerah sendiri justru mengalami penurunan. Dengan penurunan pendapatan asli daerah tentu ujungnya adalah semakin meningkatkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016 hingga tahun 2018 selalu mengalami kenaikan. Hal ini tentu saja sangat menggembarikan karena pajak daerah sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli daerah bila meningkat akan dapat meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Kenyataan bahwa terdapat kondisi yang bertentangan antara perkembangan pendapatan asli daerah yang berfluktuasi dan pajak daerah yang selalu mengalami kenaikan berarti menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli daerah selain pajak daerah mengalami fluktuasi. Sumber pendapatan asli daerah yang mengalami fluktuasi dapat saja berasal dari pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari perusahaan daerah, atau lain-lain pendapatan asli daerah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara rata-rata tahun 2017 mengalami pertumbuhan 29,35 persen sedang tahun 2018 mengalami penurunan 9,49 persen. Penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata tahun 2017 mengalami pertumbuhan 22,58 persen sedangkan tahun 2018 mengalami pertumbuhan 14,83 persen.

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

NO.	KABUPATEN / KOTA	PAD		Pajak Daerah	
		2017	2018	2017	2018
1	Kabupaten Cilacap	51,21%	-18,60%	13,49%	18,89%
2	Kabupaten Banyumas	14,46%	4,62%	35,46%	5,98%
3	Kabupaten Purbalingga	41,32%	-20,56%	29,55%	1,97%
4	Kabupaten Banjarnegara	34,58%	-20,67%	16,54%	19,13%
5	Kabupaten Kebumen	52,43%	-20,64%	26,48%	21,76%
6	Kabupaten Purworejo	16,83%	-3,90%	26,04%	28,83%
7	Kabupaten Wonosobo	14,07%	-0,53%	26,60%	8,44%
8	Kabupaten Magelang	39,89%	-19,44%	15,70%	10,77%
9	Kabupaten Boyolali	32,74%	-11,61%	22,55%	30,02%
10	Kabupaten Klaten	65,80%	6,50%	39,32%	9,95%
11	Kabupaten Sukoharjo	27,92%	-6,69%	21,92%	6,31%
12	Kabupaten Wonogiri	52,71%	-19,41%	34,68%	16,63%
13	Kabupaten Karanganyar	37,78%	-17,34%	18,12%	10,90%
14	Kabupaten Sragen	27,01%	-17,37%	-21,75%	3,74%
15	Kabupaten Grobogan	47,21%	-28,31%	20,84%	9,54%
16	Kabupaten Blora	63,50%	-27,45%	18,04%	11,08%
17	Kabupaten Rembang	28,25%	-1,21%	23,37%	68,14%
18	Kabupaten Pati	42,84%	-14,62%	14,41%	12,05%
19	Kabupaten Kudus	31,08%	-7,83%	23,06%	9,84%
20	Kabupaten Jepara	0,94%	13,46%	-9,55%	20,08%
21	Kabupaten Demak	7,71%	10,57%	42,86%	7,50%
22	Kabupaten Semarang	31,04%	-8,13%	59,33%	-9,65%
23	Kabupaten Temanggung	9,65%	-18,30%	17,89%	5,51%
24	Kabupaten Kendal	52,78%	-17,06%	28,95%	9,68%
25	Kabupaten Batang	4,69%	8,07%	24,70%	12,42%
26	Kabupaten Pekalongan	-1,67%	1,93%	16,01%	38,31%
27	Kabupaten Pemalang	54,61%	-29,45%	41,12%	18,42%
28	Kabupaten Tegal	18,82%	-0,87%	38,12%	11,00%
29	Kabupaten Brebes	54,40%	-33,75%	22,06%	17,58%
30	Kota Magelang	6,01%	6,99%	20,14%	9,86%
31	Kota Surakarta	23,98%	0,04%	14,43%	17,86%
32	Kota Salatiga	8,09%	-5,14%	2,94%	11,71%
33	Kota Semarang	20,13%	1,64%	22,36%	8,14%
34	Kota Pekalongan	7,50%	-6,66%	15,93%	15,20%
35	Kota Tegal	6,78%	-10,37%	28,75%	21,45%
	Tertinggi	65,80%	13,46%	59,33%	68,14%
	Terendah	-1,67%	-33,75%	-21,75%	-9,65%
	Rata-rata	29,35%	-9,49%	22,58%	14,83%

Sumber : Badan Pusat Statistik

2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata mengalami fluktuasi dimana tahun 2016 sebesar 27,05 persen, tahun 2017 sebesar 25,84 dan tahun 2018 sebesar 32,01 persen. Terdapat beberapa daerah yang kontribusi pajak daerahnya terhadap pendapatan asli daerah lebih dari 50 persen yaitu kota Semarang, kota Surakarta, dan kabupaten Sukoharjo. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi selalu diperoleh kota Semarang, tahun 2016 sebesar 67,47 persen, tahun 2017 sebesar 68,73 persen, dan tahun 2018 sebesar 71,13 persen. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terendah tahun 2016 dan 2017 pada kabupaten temanggung dengan kontribusi sebesar 11,55 persen dan 12,41 persen, sedangkan tahun 2018 kontribusi terendah pada kota Magelang dengan angka 13,72 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang berada dalam kisaran 10 hingga 70 persen.

Kontribusi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari jenis pajak daerah yang baru terdiri dari pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan secara rata-rata tahun 2016 lebih dari 50 persen. Kontribusi penerimaan pajak dari sumber pajak daerah yang baru tertinggi dicapai kabupaten Jepara dengan angka kontribusi 65,61 persen, sedangkan yang terendah berada pada kabupaten Pekalongan dengan kontribusi sebesar 47,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jenis pajak baru terbukti efektif menambah sumber pendapatan daerah kabupaten dan kota khususnya dari pajak daerah.

Dari keempat jenis pajak daerah yang baru kontribusi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan merupakan sumber penerimaan pajak yang terbesar, berikutnya adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis pajak daerah yang baru yang kontribusinya rendah yaitu pajak air tanah kurang dari 1 persen, dan pajak sarang burung walet juga kurang dari 1 persen bahkan banyak daerah yang tidak memungut pajak sarang burung walet karena memang tidak ada potensinya.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

NO.	KABUPATEN / KOTA	2016	2017	2018
1	Kabupaten Cilacap	32,15%	24,13%	35,24%
2	Kabupaten Banyumas	27,22%	32,21%	32,63%
3	Kabupaten Purbalingga	17,31%	15,87%	20,37%
4	Kabupaten Banjarnegara	18,81%	16,29%	24,47%
5	Kabupaten Kebumen	21,59%	17,92%	27,49%
6	Kabupaten Purworejo	16,58%	17,89%	23,98%
7	Kabupaten Wonosobo	15,15%	16,81%	18,32%
8	Kabupaten Magelang	33,66%	27,84%	38,28%
9	Kabupaten Boyolali	28,86%	26,65%	39,20%
10	Kabupaten Klaten	33,71%	28,33%	29,24%
11	Kabupaten Sukoharjo	50,12%	47,77%	54,42%
12	Kabupaten Wonogiri	15,93%	14,05%	20,34%
13	Kabupaten Karanganyar	42,36%	36,31%	48,72%
14	Kabupaten Sragen	33,20%	20,46%	25,68%
15	Kabupaten Grobogan	19,45%	15,96%	24,39%
16	Kabupaten Blora	23,97%	17,30%	26,49%
17	Kabupaten Rembang	20,68%	19,89%	33,85%
18	Kabupaten Pati	20,45%	16,38%	21,50%
19	Kabupaten Kudus	30,24%	28,39%	33,84%
20	Kabupaten Jepara	29,96%	26,85%	28,41%
21	Kabupaten Demak	31,41%	41,66%	40,50%
22	Kabupaten Semarang	33,20%	40,37%	39,70%
23	Kabupaten Temanggung	11,55%	12,41%	16,03%
24	Kabupaten Kendal	32,00%	27,01%	35,72%
25	Kabupaten Batang	25,21%	30,03%	31,23%
26	Kabupaten Pekalongan	13,13%	15,49%	21,01%
27	Kabupaten Pemasang	16,53%	15,09%	25,33%
28	Kabupaten Tegal	22,09%	25,68%	28,75%
29	Kabupaten Brebes	19,66%	15,54%	27,59%
30	Kota Magelang	11,79%	13,36%	13,72%
31	Kota Surakarta	59,24%	54,67%	64,41%
32	Kota Salatiga	23,69%	22,57%	26,57%
33	Kota Semarang	67,47%	68,73%	73,13%
34	Kota Pekalongan	29,58%	31,90%	39,37%
35	Kota Tegal	18,66%	22,50%	30,49%
	Tertinggi	67,47%	68,73%	73,13%
	Terendah	11,55%	12,41%	13,72%
	Rata-rata	27,05%	25,84%	32,01%

Sumber: Badan Pusat Statistik

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018.
- b. Pajak daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah secara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
- c. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
- d. Jenis pajak daerah yang baru khususnya pajak bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan memberi kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah.

2. Saran

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana hubungan pajak daerah dengan pendapatan daerah kabupaten dan kota di Indonesia, maka saran untuk penelitian yang akan datang adalah:

- a. Memperluas obyek penelitian tidak hanya pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah saja tetapi di perluas se wilayah Indonesia.
- b. Perlu penelitian lanjutan untuk memetakan kontribusi per jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah baik pada pemerintah kabupaten / kota atau pemerintah provinsi untuk mengevaluasi efektivitas Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyan Firdausi Mustoffa, Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo, *Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 7 No. 1, 1 - 14
- Arief Himmawan DN, Djoko Wahjudi, 2014, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 21, No. 2, Hal. 189 –205
- Purwowo, Muhammad Ali Fadillah Luthfansy, 2019, Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol 2 No 1 Hal 35-40
- Cornelin G. Kamagi, Jullie J. Sondakh, Tressje Runtu, 2016, Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011 – 2015), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 04
- Hikmah, 2017, Analisis Kontribusi pajak Daerah dan Retribui Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, *Journal of Government – JOG*, Volume 2 No. 2, 158 – 177
- Maryono dan Ida Nurhayati, 2016, Impact of Changes in Local Tax and Levies to Financial Capability of District / City in Java, *Proceedings-International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics & Call For Papers (ICOBAME)*, October 26-27, 2016, Magelang, Indonesia